

BAB II

DINAMIKA MILITER JEPANG DAN JAPAN'S NEW SECURITY BILLS

Militerisme Jepang atau *Nihon gunkoku shugi* memiliki arti yang merujuk pada ideologi dalam kekaisaran di Jepang, bahwa militerisme harus mendominasi kehidupan sosial dan politik negara. Serta berarti kekuatan militer setara dengan kekuatan sebuah negara. Berdasarkan ideologi tersebut, dapat dikatakan bahwa Jepang memiliki keterkaitan yang kuat dengan militerisme. Dalam bab ini penulis akan membahas sejarah militer Jepang, berikut dengan perubahan struktur militer Jepang hingga kebijakan *Japan's New Security Bills* yang merupakan sebuah kebijakan kontroversial yang dibuat pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe.

A. Sejarah Militer Jepang

Jepang adalah salah satu negara di dunia yang mengalami perubahan drastis pada sistem pertahanan dan keamanan negaranya. Sejak masa sebelum Perang Dunia II, Jepang merupakan negara ekspansionis yang sering bersikap agresif dalam melakukan berbagai interaksi dengan negara-negara lain di dunia. Jepang sangat berupaya untuk mewujudkan mimpinya sebagai negara pemimpin Asia.¹

¹ Vicki Puspita Wijaya, 2006, "*Pengembangan Kekuatan Militer Jepang Ditengah Peningkatan Kekuatan Militer Negara-Negara Asia Pasifik*" Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketika Jepang memasuki masa Restorasi Meiji, restorasi tersebut berdampak salah satunya pada militerisme Jepang. Pada masa pemerintahan Meiji, militer memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat Jepang. Hampir semua pemimpin di masyarakat Jepang selama periode Meiji (baik dalam militer, politik, atau bisnis) adalah mantan samurai atau keturunan samurai, dan mereka saling berbagi seperangkat nilai-nilai dan pandangan. Awal pemerintahan Meiji memandang Jepang sebagai sebuah negara yang terancam oleh imperialisme Barat, dan salah satu motivasi utama dalam melaksanakan kebijakan *Fukoku Kyohei* dalam pemerintahan Meiji adalah untuk memperkuat pondasi ekonomi dan industri Jepang, sehingga militer yang kuat dapat dibangun untuk membela Jepang dalam melawan kekuatan-kekuatan luar. Selain memperhatikan kekuatan-kekuatan dari luar yang berpotensi mengancam Jepang, pemerintahan Meiji juga memperhatikan isu-isu domestik yang mengancam keamanan Jepang. Isu-isu domestik seperti ancaman dari berbagai pemberontak internal, misalnya Pemberontakan Saga, Pemberontakan Satsuma, dan berbagai pemberontakan lain seperti pemberontakan petani pedesaan membuat Jepang membutuhkan kekuatan militer yang kuat.²

Dalam masa pemerintahan Meiji pun muncul wajib militer universal, diperkenalkan oleh Yamagata Aritomo pada tahun 1873, bersamaan dengan proklamasi reskrip Imperial terhadap Angkatan Darat dan Laut pada tahun 1882 yang memungkinkan militer untuk mengindoktrinasi ribuan orang dari berbagai latar belakang sosial dengan nilai-nilai militer-patriotik dan konsep kesetiaan yang tanpa ada pertanyaan maupun keraguan kepada Kaisar sebagai dasar negara

²Bern Martin, (1995), *“Japan and Germany in the Modern World,”* Berghahn Books, New York, hal. 31

Jepang (*Kokutai*). Yamagata seperti kebanyakan orang Jepang sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mencolok Prussia (Kerajaan Jerman dimasa lalu) pada masa itu dalam mengubah dirinya dari sebuah negara pertanian untuk menjadi negara dengan kekuatan industri dan militer terkemuka dan modern. Ia menerima ide-ide politik Prusia, yang mendukung ekspansi militer luar negeri dan pemerintah otoriter di suatu negara. Model Prussia juga mendevaluasi gagasan kontrol sipil atas militer independen, yang berarti bahwa di Jepang, seperti di Jerman, militer bisa berkembang menjadi negara di dalam negara, sehingga mereka mempraktikkan pengaruh yang lebih besar pada politik secara umum.³

Merupakan hal umum untuk menggambarkan masyarakat Jepang pada masa sebelum Perang Dunia II sebagai masyarakat yang militeristik. Sebuah kisah sejarah konvensional berjalan sebagai berikut; untuk bersaing dengan kekuatan Barat, pemerintah baru didirikan melalui Restorasi Meiji membangun tentara modern, memperkenalkan wajib militer universal, dan menuntut ketaatan secara total rakyatnya kepada negara. Militerisme di Jepang mencapai puncaknya pada era Total perang, dari akhir 1930-an, tetapi berakhir ketika pendudukan Amerika Serikat yang diikuti kekalahan dalam perang. Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II setelah dua buah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Nagasaki dan Hiroshima, sebuah tragedi yang memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian, Jepang mulai pindah pada jalur demokrasi.⁴

³*Ibid*, hal. 31

⁴ Stewart Lone, (2010), "*The Journal of Asian Studies : Provincial Life and the Military in Imperial Japan, The Phantom Samurai*," Abington, Routledge, hal. 241

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II berdampak signifikan baik secara materi maupun psikologis. Dari segi materi, jelas bahwa kekalahan dalam Perang Dunia II telah membawa kerugian besar. Jepang harus membayar dan mengganti rugi berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh perang, serta Jepang harus memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat perang, sehingga kebangkrutan mengancam ekonomi Jepang. Sementara dari sisi psikologis, kekalahan Jepang pada Perang Dunia II mengakibatkan trauma yang mendalam pada kengerian perang itu sendiri. Hal itu juga telah membawa negara Jepang kepada suatu kesadaran sekaligus pengakuan terhadap sebuah kegagalan sikap dan pandangan masa lalu yang terlalu berorientasi pada pembangunan dan pemanfaatan kekuatan militer semata. Jepang mengalami kehancuran total dalam Perang Dunia II, kehancuran tersebut menjadi bibit dari sikap anti-militer sebagian besar masyarakat Jepang.

Amerika Serikat sebagai pemenang perang memandang Jepang sebagai negara fasisme militer yang agresif dan ekspansionis, sehingga Jepang dipandang sebagai sebuah ancaman bagi tatanan keamanan internasional, serta menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di masa depan. Dengan alasan tersebut Amerika Serikat berusaha menempatkan Jepang pada suatu kondisi dimana Jepang tidak mampu lagi untuk membangun kembali kekuatannya. Kemudian Amerika Serikat menerapkan sebuah kebijakan kepada Jepang yaitu dengan melakukan penyusunan klausul anti-militer sebagaimana tercantum dalam

konstitusi tahun 1947 yang salah satu peraturannya Jepang dibatasi dalam hal kepemilikan dan pengembangan kekuatan militer.⁵

B. Perubahan Struktur Militer Jepang

Dua minggu setelah perang pasifik berakhir, Jepang diduduki oleh pasukan sekutu dibawah *Supreme Commander for The Allied Powers (SCAP)* yang di kepalai Douglas MacArthur. Lebih dari 430.000 tentara ditempatkan di Jepang pada akhir tahun 1945. Semuanya di bawah kendali SCAP, semua publikasi dikenakan penyensoran ketat, dan percakapan telepon dari tokoh-tokoh kunci yang dianggap membahayakan pendudukan Amerika Serikat bahkan disadap. SCAP membangun pondasi pasca perang Jepang, dipandu oleh dua tujuan kebijakan pokok yaitu demiliterisasi dan demokratisasi. Kegiatan utama SCAP ini diselesaikan sekitar perlucutan senjata mesin perang Jepang, pembersihan politik, pembubaran *zaibatsu*, reformasi *agricultur*, dan yang paling penting, penyusunan dan pengumuman dari konstitusi baru, yang berlaku efektif pada tanggal 3 Mei 1947.⁶

Dengan mengacu pada kebijakan pertahanan, salah satu klausul yang paling signifikan dalam konstitusi baru tersebut, yaitu pasal sembilan yang berbunyi:

“Aspiring Sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well

⁵Vicki Puspita Wijaya,*Loc.Cit.*

⁶Inoguchi Takashi dan Purnendra Jain, (2000), *Japanese Foreign Policy Today*, PALGRAVE™, New York, hal. 137

as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized."⁷

Pasal diatas berarti bahwa Jepang selamanya bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan pengancaman atau penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan perselisihan internasional. Untuk mencapai tujuan paragraf di atas, angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan dikelola. Serta hak negara untuk menyatakan perang tidak akan diakui.

Pasal sembilan pada saat itu di interpretasi oleh pemerintah Jepang sebagai aturan bahwa Jepang tidak memiliki hak untuk melakukan *collective self-defense*. Ketentuan dalam konstitusi Jepang ini nantinya yang mendasari kontroversi kebijakan *Japan's New Security Bills*. Konstitusi Pasifis yang memiliki dua paragraf ini ditafsirkan oleh pemerintah Jepang bahwa Jepang tidak dapat secara legal memiliki berbagai jenis kemampuan militer. Selain itu, partisipasi dalam perang baik secara defensif ataupun agresif tidak diperbolehkan. Pemerintah konservatif telah menafsirkan pasal yang berarti bahwa perang agresif dan perlengkapan persenjataan untuk tujuan perang tidak diperbolehkan, namun Jepang tetap memiliki hak untuk melaksanakan pelatihan kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan keberadaan negaranya. Sesuatu yang dianggap

⁷*Ibid.*

sebagai "Potensi Perang" adalah setiap kemampuan militer yang melebihi ukuran minimum yang diperlukan untuk pertahanan diri.⁸

Dengan pemerintah konservatif membentuk sebagian besar dari pemerintahan pasca perang, interpretasi mereka mendominasi diskusi keamanan Jepang. Meskipun perdebatan awal atas penciptaan dan peran Cadangan Perdamaian Nasional selama Perang Korea, pada tahun 1954 Jepang mendirikan *Self-Defense Force (SDF)* untuk tujuan pertahanan diri. Untuk itu, pemerintah menetapkan tiga kondisi di mana *Self-Defense Force* ini dapat berlaku, yaitu; 1) ketika Jepang sedang menghadapi keadaan darurat dan agresi yang ilegal; 2) tidak ada cara lain untuk melawan ancaman tersebut; dan 3) ketika penggunaan kekuatan untuk membela diri terbatas pada tingkat minimum yang diperlukan.

Pemerintah Jepang menganggap bahwa *Individual Self-Defense* tidak dianggap bermasalah, tetapi menganggap bermasalah *Collective Self-Defense*. Jepang mengakui bahwa, sebagai anggota PBB, ia memiliki hak untuk melakukan *Collective Self-Defense*, namun pemerintah Jepang secara berturut-turut telah mentafsirkan Pasal sembilan sebagai halangan pelaksanaan hak untuk melakukan *Collective Self-Defense*. Dengan demikian, ini berarti Jepang tidak pernah dalam posisi untuk membela sekutunya yaitu Amerika Serikat dari serangan, dan sebaliknya Amerika Serikat menjanjikan pertahanan Jepang.⁹

Semasa Perang Dingin, mulai timbul keinginan dari pasukan pendudukan Amerika Serikat agar Jepang dapat mengambil peran militer yang lebih aktif

⁸Sayuri Umeda, 2015, "Japan: Interpretations of Article 9 of the Constitution" Library Of Congress dalam <https://www.loc.gov/law/help/japan-constitution/interpretations-article9.php#National>. Diakses pada 23 November 2016

⁹*Ibid.*

dalam perjuangan melawan komunisme. Menyusul pecahnya Perang Korea pada tahun 1950, Divisi Infanteri ke-24 Amerika Serikat ditarik keluar Jepang dan dikirimkan bertempur di garis depan Korea, sehingga menyebabkan Jepang tidak memiliki perlindungan bersenjata.

MacArthur kemudian memerintahkan pembentukan Polisi Cadangan Nasional (*Keisatsu Yobitai, National Police Reserve*) berkekuatan 75.000 orang untuk menjaga ketertiban umum di Jepang dan menangkal setiap peluang serangan dari luar. Pembentukannya dilakukan di bawah pimpinan Kolonel Frank Kowalski dari Angkatan Darat Amerika Serikat (belakangan ia menjadi anggota Kongres AS) dengan menggunakan surplus peralatan Angkatan Darat. Untuk menghindari kemungkinan pelanggaran konstitusional, barang-barang militer diberi nama sipil: tank, misalnya, diberi nama "kendaraan khusus". Shigesaburo Suzuki, seorang pemimpin Partai Sosialis Jepang (JSP), mengajukan tuntutan di Mahkamah Agung Jepang untuk menyatakan pembentukan Polisi Cadangan Nasional sebagai tindakan yang inkonstitusional, namun kasusnya ditolak oleh majelis besar karena dianggap kurang relevan.

Mayoritas warga negara Jepang menyetujui semangat pemberlakuan Pasal sembilan dan menganggapnya penting secara pribadi. Namun sejak tahun 1990-an telah terjadi pergeseran dari sikap, yang lebih bertoleransi atas kemungkinan revisi atas pasal tersebut, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian antara peran Pasukan Bela Diri Jepang dengan pasal sembilan. Selain itu, beberapa warga negara juga menganggap bahwa Jepang seharusnya melibatkan Pasukan Bela Diri dalam upaya pertahanan kolektif, misalnya sebagaimana yang pernah dibentuk di bawah Dewan Keamanan PBB dalam Perang Teluk Perdana

Menteri Shinzo Abe menandai ulang tahun ke-60 Konstitusi Jepang pada tahun 2007 dengan seruannya untuk melakukan peninjauan kembali secara berani terhadap dokumen tersebut, sehingga dapat mengizinkan negara untuk mengambil peran yang lebih besar dalam keamanan global serta membangkitkan kembali kebanggaan nasional.¹⁰

C. Japan's New Security Bills

Dinamika militer Jepang terus bergerak, dari keadaan masyarakat Jepang yang militeristik pada masa sebelum Perang Dunia II, hingga Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan memaksa Jepang untuk akhirnya memberlakukan konstitusi tahun 1947 pasal sembilan yang dibentuk Amerika Serikat. Belakangan di tahun 2015, Jepang kembali mengangkat isu militerisme dengan pemerintahan Shinzo Abe yang mereinterpretasi pasal sembilan dalam konstitusi tahun 1947.

Menanggapi peningkatan kekuatan militer Cina, pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe meningkatkan dan menyusun ulang anggaran pertahanan. Selanjutnya, dalam rangka untuk memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat, pemerintah menyetujui pembentukan Dewan Keamanan Nasional dengan gaya Amerika Serikat, meluluskan undang-undang keamanan yang baru yang bertujuan untuk mencabut larangan yang dikenakan Jepang pada melaksanakan *hak collective self-defense*. Di bawah bendera "pasifisme proaktif", kabinet Abe merebut momentum yang disebabkan oleh dinamika kekuatan regional yang

¹⁰The Associated Press, May 2007, "Abe calls for a 'bold review' of Japanese Constitution," International Herald Tribune dalam <http://web.archive.org/web/20080502210654/http://www.iht.com/articles/2007/05/03/news/japan.php>. Diakses pada 23 November 2016

berubah untuk lebih dekat ke arah "melepaskan diri dari rezim pasca perang". Sebuah usulan revisi konstitusi Jepang, yang tidak berubah sejak tahun 1947, melambangkan tujuan Partai Liberal Demokrat yang berkuasa untuk membawa peran yang lebih otonom untuk Jepang baik dalam aliansi keamanan dengan Amerika Serikat maupun sebagai sebagai aktor internasional.¹¹

Pemerintahan Shinzo Abe, dalam keputusan Kabinet yang dibuat pada hari yang juga bertepatan dengan 60 tahun berdirinya Angkatan *Self Defense Forces* merubah interpretasi lama pemerintah terhadap Konstitusi 1947 sehingga Jepang dapat menggunakan hak *Collective Self-Defense*. *Collective Self-Defense* sendiri merupakan hak kolektif membela diri yang diabadikan dalam Pasal 51 UUD 1945 Piagam PBB. Hal ini mengacu pada hak semua negara PBB untuk menggunakan kekuatan militer untuk membela negara anggota lainnya dari serangan. Ini telah memberikan dasar untuk semua operasi militer PBB resmi, dari Perang Korea dan seterusnya.¹²

Keputusan Kabinet, menunggu perubahan yang berkaitan dengan hukum yang relevan, membuka jalan bagi *Self Defense Forces* untuk menggunakan kekuatan di luar negeri untuk membela sekutu Jepang bahkan jika Jepang sendiri tidak dalam posisi diserang. Dengan kata lain, hal itu memungkinkan Jepang untuk mengambil bagian dalam konflik di luar negeri, dan berpotensi menempatkan anggota *Self Defense Forces* dalam bahaya.

¹¹Bruce Klingner, "Japanese Defense Reform Supports Allied Security Objectives" Alliances dalam <http://www.heritage.org/research/reports/2016/01/japanese-defense-reform-supports-allied-security-objectives>. Diakses pada 4 Desember 2016

¹²Sasakawa Peace Foundation, Oktober 2015, "Collective Self-Defense" Sasakawa USA dalam <http://spfusa.org/research/collective-self-defense/>. Diakses pada 19 November 2016

Reinterpretasi pemerintahan Abe terhadap konstitusi tersebut juga tidak mengesampingkan partisipasi Jepang dalam operasi *collective self-defense* yang dipimpin PBB, yang terutama ditujukan untuk negara-negara yang melanggar perdamaian internasional. Hal tersebut menunjukkan adanya konsep menghukum, konsep yang berbeda dari pertahanan diri. Ini bertentangan dengan apa yang Perdana Menteri Shinzo Abe nyatakan pada konferensi pers menyusul keputusan Kabinet Selasa: "Jepang tidak akan mengambil bagian dalam pertempuran seperti telah terjadi dalam Perang Teluk atau Perang Irak." Meninggalkan posisi tradisional "*defense-only defense*" menjadi langkah pemerintah menandai perpindahan yang jelas dari postur pertahanan dasar pasca perang Jepang.¹³

Pada tanggal 16 Juli 2015, majelis rendah Jepang menyetujui undang-undang keamanan yang didukung oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, langkah menuju kodifikasi yang menjadi salah satu perubahan terbesar dalam postur keamanan Jepang sejak akhir Perang Dunia II. Terutama, undang-undang keamanan ini akan mengizinkan Pasukan Bela Diri Jepang untuk terlibat dalam *collective self-defense*.¹⁴ Pada September 2015, Komite Parlemen Jepang telah mengesahkan undang-undang yang kontroversial mengenai *Japan's new security bills* tersebut. Pengesahan undang-undang ini memperbolehkan Jepang untuk memperluas peran militernya. Undang-undang ini disahkan meskipun terjadi

¹³Editorials, July 2014, "*Abe guts Article 9*" The Japan Times dalam <http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/07/02/editorials/abe-guts-article-9/#.WDS9yTw2u00>. Diakses pada 19 November 2016

¹⁴Justin McCurry, September 2015, "*Japanese soldiers could fight abroad again after security bill passed*," TheGuardian dalam <http://www.theguardian.com/world/2015/sep/18/japanese-soldiers-could-fight-abroad-again-after-security-bill-passed#>. Diakses pada 05 April 2016

beberapa bentrokan dalam parlemen.¹⁵ *Japan's new security bills* adalah bagian dari tujuan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk memungkinkan tentara Jepang untuk berperang di luar negeri untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia kedua. Pendukung pengesahan Undang-undang mengatakan Jepang harus mampu untuk mempertahankan diri dari ancaman potensial dari Cina dan Korea Utara, serta menjadikan Jepang seimbang baik kekuatan ekonomi maupun kekuatan militernya. Hukum baru secara efektif mengurangi pembatasan konstitusional terhadap pasukan negara Jepang untuk memungkinkan mereka berpartisipasi untuk melakukan *Collective Self-Defense*, atau memberikan bantuan kepada sekutu terutama Amerika Serikat, bahkan ketika Jepang bukan pihak yang langsung terlibat dalam konflik maupun bukan pihak yang terancam.¹⁶

Langkah reinterpretasi Undang-undang ini adalah pergeseran terbesar dalam postur pertahanan negara Jepang sejak kekalahan perang pada Agustus 1945. Pada saat itu, lima partai oposisi, yang dipimpin oleh partai Demokrat Jepang, mengajukan serangkaian mosi tidak percaya yang ditujukan kepada perdana menteri Shinzo Abe, dan tokoh-tokoh partai Liberal Demokrat senior lainnya dalam upaya untuk menunda pemungutan suara. LDP (*Liberal Democratic Party*) dan sekutunya hanya menunggu waktu sebelum menggunakan suara mayoritas mereka di majelis tinggi untuk meluluskan undang-undang meskipun ribuan orang berdemonstrasi di luar gedung parlemen.¹⁷

¹⁵Kim Min-ji, report September 19 2015, "*PRIME TIME NEWS 22:00 Japan passes controversial security bills as protests rage on,*" ARIRANG TV NEWS dalam <https://www.youtube.com/watch?v=qkrROONM6hc>. Diakses pada 3 April 2016

¹⁶ Justin McCurry, *Loc., Cit.*

¹⁷*Ibid*

Perdana Menteri Shinzo Abe percaya, Jepang harus lebih siap untuk menanggapi lingkungan keamanan baru dan tidak pasti yang mencakup perilaku agresif Cina baik dalam permasalahan laut Cina Selatan maupun di dekat pulau Senkaku/Diaoyu, nuklir Korea Utara dan terorisme internasional terutama semenjak dua warga negara Jepang diculik dan dibunuh oleh teroris Negara Islam (ISIS), masyarakat dengan cepat menyalahkan Abe untuk apa yang mereka lihat sebagai sebuah campur tangan yang tidak perlu dalam urusan keamanan internasional. Abe telah berjanji memberikan bantuan non-militer sebanyak \$200 juta ke negara-negara yang memerangi ISIS, dan isyarat simbolis nya bertemu dengan konsekuensi konkret. Meskipun *Japan Self Defense Forces* akan jauh terlibat dalam misi lebih berbahaya di bawah *Japan's New Security Bills*, dengan itu pihak oposisi memperingatkan bahwa Jepang dengan undang-undang keamanan yang baru bisa saja diseret kedalam konflik yang merusak di luar negeri atas perintah dari sekutu utamanya, Amerika Serikat.¹⁸

Secara umum *Japan's New Security Bills* akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar, responsif, dan interoperabilitas untuk pelatihan, latihan, dan perencanaan pada spektrum yang lebih luas dari isu-isu keamanan dengan mengurangi pembatasan pada operasi *Self Defense Forces*, termasuk kemampuan untuk praktik *collective self-defense*. Undang-undang ini akan memberdayakan Jepang untuk melindungi daerah sekitarnya dan lebih proaktif memberikan kontribusi untuk menjaga stabilitas regional.

¹⁸ Tom Le, Oktober 2015, "*Japan's Security Bills: Overpromising and Under-Delivering*," The Diplomat Magazine dalam <http://thediplomat.com/2015/10/japans-security-bills-overpromising-and-under-delivering/>. Diakses pada 5 April 2016

Undang-undang pertahanan baru akan memungkinkan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Menghilangkan kendala geografis dengan menggantikan ambang situasional (situasi yang "serius mempengaruhi perdamaian dan stabilitas Jepang") daripada membatasi dukungan kepada "Situasi di Daerah Sekitar Jepang."
2. Kewenangan dukungan untuk tentara non-Amerika Serikat. Ini memungkinkan Jepang untuk memberikan dukungan logistik yang lebih besar untuk negara-negara sahabat untuk bersama mengatasi situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional meskipun tidak kegiatan tempur sedang dilakukan.
3. Memperluas jangkauan dukungan logistik yang diijinkan, seperti pengisian bahan bakar pesawat tempur dan mengangkut amunisi untuk Amerika Serikat dan pasukan militer asing lainnya dalam operasi multinasional.
4. Memungkinkan interaksi sekutu dalam skenario abu-zona antara konflik bersenjata dan damai tindakan penegakan hukum, di mana respon cepat dan kuat diperlukan untuk mengamankan perdamaian dan keamanan Jepang bahkan ketika serangan bersenjata terhadap Jepang tidak terlibat. Sebuah contoh penting akan serbuan non-militer Cina ke wilayah perairan Jepang dan wilayah udara.
5. Memungkinkan penyebaran SDF dengan lebih tepat waktu untuk operasi multilateral. Sebelumnya, parlemen diminta untuk memberlakukan hukum sementara yang baru untuk setiap pengiriman pasukan SDF ke luar negeri untuk mendukung operasi penjagaan perdamaian internasional dan untuk menyatakan memerangi yang tidak diharapkan, dekat pasukan Jepang. Undang-undang keamanan baru menyediakan permanen dan *standing law*,

meskipun masing-masing penyebaran masih akan memerlukan persetujuan parlemen terlebih dahulu.

6. Menciptakan aturan yang tidak membatasi keterlibatan. Dulu pasukan SDF dihalangi dari menggunakan senjata mereka ketika menyelamatkan warga Jepang yang telah disandera di luar negeri. Tetapi aturan baru mengenai keterlibatan pasukan SDF menjadi lebih baik dan sesuai dengan U.N. standar saat ini, yang juga digunakan oleh negara-negara lain.
7. Memungkinkan SDF untuk melindungi aset militer negara-negara sahabat. SDF sekarang dapat mempertahankan aset militer, termasuk kapal perang dari Amerika Serikat dan "negara asing dalam hubungan dekat dengan Jepang" jika tiga kondisi baru terpenuhi: serangan mengancam hak konstitusional masyarakat Jepang atas kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan; tidak ada cara lain yang tersedia untuk mengusir serangan; dan penggunaan kekuatan terbatas sesuai minimum yang ditetapkan.¹⁹

Pada awal masa jabatan kedua sebagai Perdana Menteri, Shinzo Abe menugaskan sebuah kelompok untuk mempelajari implikasi dari interpretasi pasal sembilan di kontinjensi tertentu. Komisi tersebut mengeluarkan laporan pada tanggal 15 Mei, 2014. Laporan tersebut merekomendasikan, reinterpretasi konstitusi 1947 pasal sembilan yang akan memungkinkan praktik *collective self-defense* tanpa hambatan. Pada tanggal 1 Juli 2014, menyusul tawar-menawar antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mitra koalisinya, *New Komeito*, pihak Partai Buddha yang memegang prinsip pandangan pasifis (perdamaian), kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe menyetujui reinterpretasi pasal sembilan. Meskipun

¹⁹Bruce Klingner. *Loc., Cit.*

pada dasarnya mempertahankan tiga kondisi mengenai praktik *self-defense*, reinterpretasi termasuk kemampuan Jepang untuk membantu negara-negara lain.

Berikut hasil reinterpretasi pasal sembilan :

“The Government has reached a conclusion that not only when an armed attack against Japan occurs but also when an armed attack against a foreign country that is in a close relationship with Japan occurs and as a result threatens Japan’s survival and poses a clear danger to fundamentally overturn people’s right to life, liberty and pursuit of happiness, and when there is no other appropriate means available to repel the attack and ensure Japan’s survival and protect its people, use of force to the minimum extent necessary should be interpreted to be permitted under the Constitution as measures for self-defense in accordance with the basic logic of the Government’s view to date.”

Pemerintah telah mencapai kesimpulan bahwa tidak hanya ketika serangan bersenjata terhadap Jepang terjadi tetapi juga ketika serangan bersenjata terhadap negara asing yang ada hubungan dekat dengan Jepang terjadi dan sebagai hasilnya mengancam kelangsungan hidup Jepang dan menimbulkan bahaya yang jelas untuk secara mendasar membatalkan hak rakyat untuk hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan, dan ketika tidak ada cara lain yang sesuai tersedia untuk mengusir serangan dan menjamin kelangsungan hidup Jepang dan melindungi rakyatnya, penggunaan kekuatan sejauh minimum yang diperlukan harus ditafsirkan akan diizinkan di bawah konstitusi sebagai langkah untuk pertahanan diri sesuai dengan logika dasar dari pandangan Pemerintah sampai saat ini.²⁰

Terdapat batasan pemahaman terhadap *Self Defense Forces* dalam pemahaman pemerintah Jepang. Interpretasi pemerintah terhadap pasal sembilan Konstitusi 1947, mengandung dua keterbatasan aktivitas pada *Self Defense Forces*

²⁰Sasakawa Peace Foundation, *Loc.Cit.*

yang dikirim ke luar negeri atau bekerja sama dengan pasukan militer asing. Salah satunya adalah dengan adanya penolakan masyarakat Jepang terhadap "penggunaan kekuatan" berdasarkan pasal sembilan. Dengan demikian, sesuai dengan pasal sembilan, *Self Defense Forces* tidak dapat menggunakan kekuatan. Keterbatasan lainnya adalah mengenai hak *collective self-defense*, di mana Jepang hanya diperbolehkan untuk mempertahankan diri.

Pemerintah telah menjelaskan bahwa "penggunaan kekuatan" berdasarkan pasal sembilan ayat 1 dalam konstitusi berarti tindakan tempur oleh sebuah organisasi yang terdiri dari orang Jepang dilakukan dengan bahan-bahan yang disediakan oleh Jepang dan merupakan bagian dari konflik bersenjata internasional. Penjelasan ini diberikan selama perdebatan legislatif dalam kaitannya dengan penggunaan senjata api dan senjata kecil oleh anggota *Self Defense Forces*. Masalah kemampuan Jepang untuk berpartisipasi dalam sistem pertahanan kolektif menjadi semakin penting sebagai kerjasama Jepang dengan Amerika Serikat di bidang peningkatan keamanan. Pertahanan kolektif belum dibahas ketika Konstitusi Jepang diberlakukan. Pemerintah pada awalnya mengambil pandangan bahwa bahkan hak membela diri individu akan dibatasi di bawah artikel 9. Pelaksanaan hak pertahanan kolektif karena itu keluar dari pertanyaan. Pertahanan kolektif diperdebatkan ketika Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian kerjasama keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang diserahkan ke parlemen untuk diratifikasi. Perjanjian Perdamaian mengakui hak Jepang dalam *Collective Self-Defense*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dari Piagam PBB. Bagian yang relevan dari Perjanjian kerjasama keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang tahun 1951 berbunyi sebagai berikut:

Perjanjian Perdamaian mengakui bahwa Jepang sebagai bangsa yang berdaulat memiliki hak untuk masuk ke dalam pengaturan keamanan kolektif, dan selanjutnya, Piagam PBB mengakui bahwa semua bangsa memiliki hak yang melekat yakni *Individual Self-Defense* maupun *Collective Self-Defense*. Dalam pelaksanaan hak-hak tersebut, Jepang berkeinginan, sebagai pengaturan sementara untuk pertahanan, bahwa Amerika Serikat harus mengelola angkatan bersenjata sendiri dan di Jepang untuk mencegah serangan bersenjata terhadap Jepang.

Selanjutnya mengenai posisi pemerintah tentang *Collective Self-Defense* yang telah berlangsung hampir 60 tahun, berubah pada tahun 2014. NSC bertindak sebagai koordinator antara Departemen Pertahanan (MOD), Departemen Luar Negeri (Deplu), dan partai yang berkuasa mengenai hal ini. Kabinet mengadopsi resolusi yang memungkinkan *Self Defense Forces* untuk mengambil tindakan dalam mendukung sekutu yang telah diserang musuh. Pembukaan resolusi menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada negara dapat menjamin perdamaian sendiri hanya dengan sendirinya, dan masyarakat internasional juga mengharapkan Jepang untuk memainkan peran yang lebih proaktif untuk perdamaian dan stabilitas di dunia, dengan cara yang sepadan dengan kemampuan nasional.”

Secara khusus, adalah penting untuk menghindari konflik bersenjata sebelum mereka terwujud dan mencegah ancaman terhadap Jepang dengan lebih meningkatkan efektivitas pengaturan keamanan Jepang dan Amerika Serikat dan meningkatkan pencegahan terhadap aliansi Jepang-Amerika Serikat untuk keamanan Jepang dan perdamaian serta stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.

Pemerintah mengklaim bahwa logika dasar di balik penafsiran pasal sembilan tidak berubah-yaitu, pasal sembilan tidak melarang Jepang dari mengambil tindakan pembelaan diri, tapi itu langkah-langkah untuk membela diri hanya diperbolehkan ketika ancaman tak terelakkan dan harus segera menangani situasi yang melanggar hukum dimana di dalamnya terdapat hak rakyat untuk hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan secara fundamental terbalik karena serangan bersenjata oleh negara asing, dan untuk menjaga hak-hak rakyat. Oleh karena itu, "penggunaan kekuatan" sejauh minimum yang diperlukan untuk itu diperbolehkan. Di bawah logika ini, pemerintah memahami bahwa "penggunaan kekuatan" diizinkan hanya ketika Jepang berada di bawah serangan bersenjata. Sedangkan logika dasar yang sama telah dipertahankan, setelah mempertimbangkan beberapa perubahan pada lingkungan keamanan, pemerintah tidak menyatakan bahwa tindakan berdasarkan *Collective Self-Defense* diizinkan berdasarkan pasal sembilan. Sebaliknya, pemerintah memperluas standar dari "penggunaan kekuatan," sehingga Jepang dapat menggunakan kekuatan, ketika sekutu Jepang diserang.²¹

Pada bulan Februari 2015, partai yang berkuasa mulai membahas undang-undang keamanan baru yang disebut sebagai resolusi Kabinet. Para pihak yang berkuasa, LDP dan Komeito, menandatangani perjanjian pada undang-undang pada bulan Maret 2015. Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang sepakat bahwa Pedoman Pertahanan baru akan mencerminkan undang-undang keamanan baru,

²¹Sayuri Umeda, *Loc. Cit.*

dan merevisi pedoman pertahanan Amerika Serikat dan Jepang pada tanggal 27 April 2015.²²

Pedoman pertahanan baru pada tahun 2015 menjadi salah satu pendorong pemerintahan Abe untuk segera memperlakukan *Japan's New Security Bills*. Pada tanggal 27 April 2015, pada pertemuan Komite Konsultatif Keamanan di New York Amerika Serikat. Sekretaris Negara dan Pertahanan, John Kerry dan Ashton Carter, dan rekan-rekan mereka di Jepang meluncurkan pedoman untuk Kerjasama Pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat yang baru, dan merupakan update pertama sejak tahun 1997. Dengan mengenali reinterpretasi pasal sembilan, Pedoman tersebut berjanji untuk secara signifikan mengubah aliansi. Pedoman pertahanan tersebut mencerminkan bahasa keputusan Abe Kabinet 2014, hampir kata demi kata:

"The Self-Defense Forces will conduct appropriate operations involving the use of force to respond to situations where an armed attack against a foreign country that is in a close relationship with Japan occurs and as a result, threatens Japan's survival and poses a clear danger to overturn fundamentally its people's right to life, liberty, and pursuit of happiness, to ensure Japan's survival, and to protect its people."

"Pasukan Bela Diri akan melakukan operasi sesuai yang melibatkan penggunaan kekuatan untuk menanggapi situasi di mana serangan bersenjata terhadap negara asing yang memiliki hubungan dekat dengan Jepang terjadi dan sebagai hasilnya, mengancam kelangsungan hidup Jepang dan menimbulkan bahaya yang jelas untuk membatalkan fundamental hak rakyatnya untuk hidup,

²²Sasakawa Peace Foundation, *Loc.Cit.*

kebebasan, dan mengejar kebahagiaan, untuk menjamin kelangsungan hidup Jepang, dan untuk melindungi rakyatnya."

Kata-kata dalam pedoman pertahanan tersebut akan memungkinkan perluasan peran Jepang dalam Aliansi. Di bawah Pedoman sebelumnya, *Self Defense Forces* sangat dibatasi untuk bergabung, atau dilarang dari berbagai jenis koordinasi dan kerjasama yang biasa Amerika Serikat lakukan secara rutin dengan sekutu yang lain seperti Korea Selatan dan Australia. Pedoman baru mengakui "sifat global" dari Aliansi dan langkah-langkah garis besar untuk memungkinkan pasukan Amerika Serikat dan *Self Defense Forces* dapat beroperasi bersama-sama. Pedoman baru juga menyediakan operasi evakuasi non-kombatan luar negeri, termasuk untuk warga negara di dunia ketiga.

Untuk melaksanakan pedoman pertahanan yang baru antara Amerika Serikat dan Jepang ini, pemerintah Jepang harus meluluskan kebijakan *Japan's New Security Bills*. Meskipun demikian legislasi keamanan bersamaan dengan pedoman pertahanan yang telah direvisi antara Amerika Serikat dan Jepang menjanjikan untuk mentransformasi kerangka hukum dan kelembagaan untuk kebijakan pertahanan Jepang dan hubungan keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang. Kementerian Pertahanan Jepang dan *Self-Defense Forces* kini sibuk mengoperasionalisasi hukum-hukum dan pelatihan personil *Self-Defense Forces* yang sesuai. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar satu tahun.²³

Japan's New Security Bills, yang disahkan pada 19 September 2015 memungkinkan diadakannya bentuk *collective self-defense* secara terbatas, dan

²³*Ibid.*

telah digambarkan sebagai sesuatu yang “menjauh dari pasifisme”. Namun terdapat kendala domestik ketika undang-undang baru ini disahkan. Sebagian masyarakat Jepang tidak menyetujui pemberlakuan *Japan’s New Security Bills*, selain memiliki trauma yang mendalam terhadap perang di masa lalu masyarakat Jepang juga sudah sejak lama mentaati norma *pacifis*.

Pada kenyataannya kepercayaan publik atas berlakunya *Japan’s New Security Bills*, telah runtuh. Berdasarkan aturan 60 hari agar undang-undang dapat diberlakukan berjalan dengan buruk, *polling* menunjukkan bahwa mayoritas publik menentang pemberlakuan *Japan’s New Security Bills* pada sesi di parlemen karena pemerintah belum menjelaskan secara memadai mengapa perubahan seperti memungkinkan Jepang untuk menggunakan kekuatan di luar negeri untuk pertama kalinya dalam sejarah pasca perang diperlukan.

Upaya Abe untuk membujuk masyarakat tampaknya memiliki pengaruh yang kecil sejauh ini. Rating dukungan untuk kabinetnya telah turun di bawah 40 persen dan mereka yang tidak setuju sekarang melebihi mereka yang menyetujui jabatan perdana menteri. Meskipun Partai oposisi utama Demokrat Jepang (DPJ) terus membuntuti jauh di belakang pemerintah dalam jajak pendapat, ada muncul strain antara mitra koalisi LDP, Komeito, dan basis dukungan *Sokka Gakkai* atas isu keamanan.

Dalam sebuah esai yang terbit pada awal Agustus 2015, Ben Ascione menjelaskan bahwa legalitas undang-undang telah berada dalam pengawasan setelah tiga ahli konstitusional terkemuka bersaksi di depan parlemen bahwa undang-undang keamanan tidak konstitusional. Pemerintah awalnya menyatakan

bahwa ahli konstitusi tersebut tidak mewakili konsensus di antara para ahli namun terpaksa mundur setelah jelas bahwa undang-undang keamanan ini tidak benar.

Ben Ascione juga mengatakan beberapa ketidakpercayaan publik terhadap tujuan Abe dalam memberlakukan Japan's New Security Bills, sebagai berikut :

'There is also some public distrust of Abe's ultimate intentions. Abe is on the public record as wanting to formally revise Article 9. Doing so requires not only a two-thirds majority in both houses, but also a majority in a national referendum. Without the public support for a formal revision, reinterpreting the constitution was a practical, if unpopular, way for Abe to move forward with his security agenda. Critics have labelled his approach a "revision by stealth" and a "destruction of the rule of law."

Ben Ascione juga menyebutkan mengenai dua pertanyaan besar yang timbul dari adanya pemberlakuan *Japan's New Security Bills* yaitu efek apa yang akan didapatkan pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, dan bagaimana *Japan's New Security Bills* dapat berperan di lingkungan keamanan regional Asia Timur.

Abe telah banyak mengeluarkan modal politik untuk pemberlakuan *Japan's New Security Bills* ini. Isu ini pun telah mengalihkan perhatian besar-besaran dari agenda reformasi ekonomi *critical*-nya. Ancaman terhadap kepemimpinannya adalah dari dalam LDP, bukan dari partai oposisi, yang terus membuntuti pemerintahannya.²⁴

Selain itu di Jepang, partai-partai oposisi secara efektif memaanuver Perdana Menteri Shinzo Abe dalam mengendalikan narasi *Japan's New Security Bills*. Dengan membingkai reformasi undang-undang sebagai "*war Bill*" memungkinkan militarisme melalui proses yang tidak demokratis, mereka

²⁴ Peter Drysdale, August 2015, "*The trouble with Japan's new security bills*" East Asia Forum dalam <http://www.eastasiaforum.org/2015/08/03/the-trouble-with-japans-new-security-bills/>. Diakses pada 19 November 2016

terampil memobilisasi dukungan sebagai oposisi untuk melawan pemerintah dalam kebijakan *Japan's New Security Bills*. Sehingga partai-partai oposisi ini mampu menciptakan kondisi untuk organisasi-organisasi lainnya untuk menyebarkan atau melakukan propaganda narasi yang memiliki arti bahkan lebih menyesatkan bahwa pemerintah adalah “fasis” dan “*war mongering*”.

Partai-partai oposisi selalu menekankan pada norma-norma pasifis untuk melemahkan pemerintah Abe dan mencoba untuk mendapatkan beberapa momentum untuk meningkatkan prospek politik mereka sendiri. Di samping narasi keterbatasan dalam *security bills* yang ketat, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebelum ketentuan *collective self-defense* dalam undang-undang baru bisa diterima. Yang pertama adalah “serangan bersenjata terhadap negara asing yang ada hubungan dekat dengan Jepang yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dan menimbulkan bahaya yang jelas secara mendasar membatalkan hak rakyat untuk hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan”. Kedua, tidak ada cara lain yang sesuai dan juga tersedia untuk mengusir serangan. Ketiga, penggunaan kekuatan harus tetap mengacu pada tingkat minimum yang diperlukan. Jelas, sebuah negara yang berorientasi militerisme atau perang tidak akan membuat hukum dengan begitu banyak keterbatasan.

Pihak oposisi berpendapat bahwa *Japan's New Security Bills* adalah pergeseran dari cita-cita pasifis Jepang pasca-Perang Dunia II. Undang-undang baru menetapkan bahwa Jepang dapat membantu sekutu dalam konflik yang memiliki konsekuensi langsung untuk Jepang, seperti di Semenanjung Korea, melalui penyediaan pasokan dan logistik. Tapi ini tidak berarti *Self-defense forces* dalam posisi siap tempur. Kata kuncinya adalah “bisa (membantu)”.

Mengingat norma pasifis Jepang, bersamaan dengan fenomena penyusutan populasi dan populasi tua, sulit untuk membayangkan ketika terjadinya sebuah krisis (serangan terhadap kepulauan Jepang) yang akan mendapatkan dukungan dari warga biasa. Selanjutnya membatasi pergeseran radikal dari pasifisme adalah resolusi pelengkap negosiasi dengan tiga partai kecil yang mensyaratkan bahwa setiap praktik *collective self-defense* akan tunduk pada persetujuan parlemen sebelumnya.

Dapat dikatakan bahwa pihak oposisi tampaknya menderita amnesia selektif. Sebelumnya pada bulan April 2012 di bawah pemerintahan Partai Demokrat Jepang, Jepang dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat “kerja sama bilateral dalam pertahanan dinamis, termasuk pelatihan bersama secara tepat waktu dan efektif, pengawasan bersama dan kegiatan pengintaian”, serta pada tahun 2012, Jepang dan Australia sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan bilateral, trilateral (dengan AS) dan tingkat internasional. Terdapat juga penambahan kegiatan *Self Defense Forces* Jepang yang sejalan dengan pelanggaran batas geografis.

Sementara *Japan's New Security Bills* dianggap sebagai pemutusan undang-undang yang tidak demokrasi, padahal undang-undang itu sendiri dibuat dengan berkonsultasi dengan mitra koalisi junior Partai Demokrat Liberal, yang merupakan Komeito. Disahkan dengan dukungan dari tiga partai kecil tambahan, untuk hitungan akhir yaitu 148 mendukung dan 90 menentang. Pemerintah saat ini, telah melalui dua pemilu di mana mereka memenangkan mayoritas kursi.

Bagian dari kebijakan keamanan Abe menggarisbawahi bagaimana narasi politik regional dan domestik yang digunakan untuk melakukan konsolidasi dukungan politik. Pemerintah Jepang kini harus menjelaskan isi dari *new security bills* tersebut untuk masyarakat Jepang secara lurus ke depan dengan memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat dengan pengetahuan, untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dengan cara yang lebih tepat, untuk menghindari narasi menyesatkan, dan agar masyarakat Jepang dapat menerima kebijakan *Japan's new security bills*.²⁵

²⁵ Stephen Nagy, oktober 2015 “*How Abe is losing the narrative on Japan's new security laws*” Department of Politics and International Studies at the International Christian University (ICU), Tokyo. East Asia Forum dalam <http://www.eastasiaforum.org/2015/10/09/how-abe-is-losing-the-narrative-on-japans-new-security-laws/>. Diakses pada 22 November 2016